BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan politik Belanda sangat berpengaruh terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia utamanya para pelajar, dalam bidang pendidikan dikenal istilah *Politik Etis* (hutang balas budi), akibat dari kebijakan ini banyak pelajar Indonesia yang mendapatkan pendidikan kurikulum Belanda, gaya pendidikan inilah yang memicu adanya perbedaan antara pelajar umum dan pelajar santri.

Pelajar yang mengenyam pendidikan berbasis kurikulum Belanda memiliki cara pandang yang lebih luas, berperilaku seperti orang Belanda dalam berpakaian, cara bicara, bersikap dan tingkah laku sehari-hari. Akibatnya pandangan dan rasa keagamaannya mulai menipis karena cara berpikir dan cara menyikapi Agama. Bagi pelajar umum, hidup harus di orientasikan pada dunia, buakan pada Tuhan yang hanya berorientasi pada akhirat. Sedangkan pelajar atau santri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan Agama, sehingga timbulah perpecahan antar keduanya, adanya saling mengejek dan enggan untuk bergaul.[1]

[1] Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-bayang Negara; Study Kasus Pelajar Islam Indonesia tahun 1980-1990* (Yogyakarta: UII Press, 2006), p.55

Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Pelajar Islam Indonesia, bergerak dibidang sosial-pendidikan dan dakwah. PII didirikan di Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1947 oleh Joesdi Ghozali yang menjadi inspirator pembentukan wadah bagi para pelajar Islam yang ketika itu belum terkoordinasi, bersama kawan-kawannya yaitu Anton Timur Djaelani, Amir Syahri, Ibrahim Zarkasji dan Noorsjaf.

Berangkat dari realitas sejarah yang menunjukan bahwa pelajar mempunyai peran strategis dalam kancah perpolitikan yang secara langsung telah memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia. Bagaimanapun pelajar merupakan bagian dari lapisan generasi muda yang tidak terpisahkan dari proses sejarah. Pelajar juga dikenal sebagai tulang punggung masyarakat yang diberi tugas untuk turut serta mengemban arah perbaikan masa depan bangsa Indonesia.

Pelajar Islam Indonesia mempunyai kiprah yang turut mewarnai berbagai perjuangannya dalam dinamika sejarah di Indonesia. Peran politik pelajar pada era (massa) pra-kemerdekaan ataupun paska-kemerdekaan lebih memperioritaskan diri untuk menyatukan identitas bangsa sebagai anti tesa atas kolonialisme penjajahan yang menguasai sendi-sendi kehidupan terutama cara berfikir generasi muda. Sesuai dengan konteksnya, gerakan PII

lebih banyak diwarnai oleh keikutsertaannya dalam mempertahankan kemerdekaan.[2]

Kekalahan tentara Jepang pada Tahun 1942 terhadap pihak sekutu dalam pertempuran di Indonesia, peta kekuasaan mulai berubah. Jepang yang pada awal peperangan di Asia Pasifik sangat ofensif atau sangat siaga menghadapi militer dari negara lawannya dan seolah-olah tidak dapat dibendung gerakannya, kembali berbalik defensive atau bertahan dalam menghadapi gempuran-gempuran tentara sekutu. Kekalahan yang terus-menerus dialami pihak Jepang tersebut tidak lepas dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Mereka terus mengikuti perkembangan yang terjadi melalui siaran radio yang dipancarkan dari luar negeri.[3]

Saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus Tahun 1945 yang di kumandangkan oleh Sukarno, tidak langsung didengar oleh rakyat banyak. Hanya sebagian kecil rakyat Indonesia saja yang menghadiri saat-saat proklamasi dibacakan di pekarangan rumah Pegangsaan Timur No 56 Jakarta.[4] Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945, maka bangsa Indonesia telah menyatakan kebebasannya dari belenggu penjajahan. Akan tetapi persoalan bukan hanya sebatas tentang penjajahan saja, problem internal

---

[2] Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-bayang Negara ; Study Kasus Pelajar Islam Indonesia tahun 1980-1990* (Yogyakarta: UII Press, 2006), p.6.

[3] Josef A. Warouw dkk, *KRIS 45 Perjuangan Membela Negara* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1999), p. 26.

[4] A. Warouw, *KRIS 45…, p.27.*

yang dipicu oleh berbagai masalah menjadi objek yang harus di selesaikan oleh pemerintah.

Pada masa Orde Lama PII menunjukan diri sebagai organisasi yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu puncaknya adalah penolakan PII terhadap konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang dicetuskan oleh Soekarno. PII juga mempunyai andil yang besar terhadap pendirian Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya menumbangkan Orde Lama.[5]

Adanya kebijakan Soekarno mengenai NASAKOM maka komunis menjadi problem tersendiri yang dihadapi oleh Indonesia kala itu, seperti yang kita ketahui, pada masa sebelum 1965, Indonesia adalah salah satu negara yang ditargetkan dimasukan dalam jaringan komunisme dunia. Namun kita patut bersyukur karena kita dapat menghalau ideologi komunisme pada tahun 1965 saat itu ideologi Komunis sedang dalam masa jaya. Kemampuan itu patutlah dibanggakan karena hanya Indonesia yang dapat mengatasi masalah komunisme tanpa bantuan pihak-pihak luar. Walaupun Indonesia saat itu sangat miskin, namun keberhasilan itu dapat

[5] Hanan, *Gerakan Pelajar…,* p.7

menjadi bekal tatkala Indonesia memulai pembangunan yang sistematis dan berkesinambungan.[6]

Kondisi politik massa transisi pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru nampak relatif damai, walaupun pada awal transisi pemerintahan itu sebenarnya terdapat dualisme pemerintahan.[7] Tahun 1965 Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia, tapi disisi lain Soeharto adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memegang kendali kekuasaan yang dianggap sebagai kewenangan Presiden Soekarno, seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) di mana pembubaran partai politik adalah kewenangan presiden.

---

[6] *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman* (Jakarta: Mejlis Nasional KAHMI, 1997), p 26-27.

[7] Maksudnya adalah tidak adanya perlawanan atau pemberontakan dari para pendukung Soekarno kepada Suharto di bandingkan masa transisi kekuasaan yang terjadi di Negara-negara lain seperti halnya adalah negara Mesir antara Anwar Sadat dengan Hoesni Mubarok.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah pokok yang diteliti dalam studi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum Pelajar Islam Indonesia (PII)?
2. Bagaimana Kondisi Politik Pada Masa Transisi Di Indonesia Tahun 1965-1967?
3. Bagaimana Kiprah Pelajar Islam Indonesia (PII) dalam Kancah Perpolitikan pada Masa Transisi Pemerintahan di Indonesia (1965-1967)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang dapat memberikan penjelasan tentang:

1. Gambaran Umum Pelajar Islam Indonesia.
2. Kondisi Politik Pada Masa Transisi Di Indonesia Tahun 1965-1967.
3. Kiprah Pelajar Islam Indonesia (PII) Dalam kancah Perpolitikan Pada Masa Transisi Pemerintahan di Indonesia (1967-1967).

D. Kerangka pemikiran

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* yang berarti kota atau negara. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polities* yang berarti kewarganegaraan, Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan

negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.[8]

Pemikiran politik banyak terinspirasi oleh para filsuf Yunani, yakni Aristoteles yang memakai politik sebagai inti dari kehidupan sosial. Menurut Aristoteles bahwa politik merupakan suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Di dalam *polity* manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.[9]

Pembahasan politik sangatlah luas dan tidak terbatas pada pemakaian makna saja, banyak sekali ragam pemikiran dan pengertian yang diungkapkan oleh para ahli yang mendeifinisikan pengertian politik dengan perspektif yang beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Miriam Budiarjo mendefinisikan politik secara umum adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis.
2. Deliar Nur menyebutkan bahwa, ilmu politik memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

---

[8] Aka Kamarulzaman, Kamus Istilah Serapan (Yogyakarta: Absolut, 2005), p.556.

[9] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia pustaka Utama 2008), p.14

3. W.A. Robson, menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.[10]

Kegiatan politik dalam suatu negara berkaitan dengan kekuasaan (*Power*), pengambilan keputusan (*Decision Making*), kebijakan politik (*Pubic Polity*) dan distribusi atau alokasi (*Allocation Or Distribution*). Namun demikian, politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara saja atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa hal, politik juga menyentuh pada wilayah aspek kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pada konsep politik dari awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang di tempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemeriantahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan memertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang

[10] Budiarjo, *Dasar-Dasar*,… p. 15-20.

dianggap penting.[11] Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.[12]

Pemerintahan seperti teori yang dikemukakan di atas terjadi dalam masa pemerintahan Orde Lama, baik politik yang sifatnya kepentingan umum ataupun bersama. Kondisi perpolitikan yang terjadi pada masa itu telah melibatkan berbagai kalangan diantaranya adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) yang juga turut mewarnai kondisi perpolitikan di masa itu, contohnya Agresi Militer I dan Agresi militer II yang dilakukan oleh Belanda karena ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam dan rempah-rempah. Bukan hanya itu kondisi perpolitikan pada masa Orde Lama sangat rentan terhadap idiologi komunis, mengingat Indonesia pada masa itu adalah salah satu negara yang menjadi target dalam jaringan komunisme di dunia.

Hingga akhirnya pada tahun 1965, Pelajar Islam Indonesia (PII) dengan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) di bawah pimpinan M.Husnie Thamrin yang menjadi ketua KAPPI pusat menjadi ujung tombak angkatan enam-enam menumpas G30S/PKI sampai akar-akarnya. Dengan demikian teori politik Aristoteles di atas relevan dengan

---

[11] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia 1992) p.1-2.

[12] Subakti, *Memahami ilmu*,… p.2.

kondisi masa Orde Lama terutama pada masa transisi dan pada Kiprah Pelajar Islam Indonesia (PII) dalam kancah perpolitikan di masa itu. Begitu juga organisasi-organisasi lainnya baik itu yang berbasis mahasiswa, pemuda ataupun Islam.

E. Metodologi Penelitian

Dalam skipsi ini penulis menggunakan metode sejarah, yaitu suatu perangkat aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang secara sistematis digunakan untuk mencari atau menggunakan sumber-sumber sejarah yang kemudian menilai sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dipakai.

Metode Penelitian Sejarah mempunyai lima tahap yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3)verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretas:analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.[13]

1. Pemilihan Topik

   Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis harus terlebih dahulu menentukan topik yang dianggap menarik untuk dijadikian sebagai skripsi. Selain itu penulisan harus pula didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki mengenai organisasi. Pemilihan topik adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian ilmiah. Dalam

[13]Kuntowijiyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jogjakarta, Yayasan Bentang Budaya 1995) p. 91.

tahapan ini, topik yang dikaji harus bersifat *workable*, dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia, tidak terlalu luas dan melampaui waktu.

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedeketan emosional adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada ketertarikan terhadap topik penelitian tertentu atau pengenalan yang lebih dekat tentang hal yang terjadi disekitarnya. Melalui pendekatan ini, kita bisa mengajukan pertanyaan 5W-1H (where, when, who, why, dan how). Sementara itu, pendekatan intelektual adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, data atau sumber-sumber yang diperlukan bisa dicari melalui studi pustaka. Adapun kedekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual, mengingat penulis memiliki kesamaan dalam basis massa organisasi Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

2. Heuristik

Tahapan Heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data, Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu Heuriskein artinya proses pencarian data atau sumber dari peristiwa masa lampau baik secara tertulis maupun secara lisan.[14]

[14] Abdurohman Dudung, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), p.55.

Dalam tahapan heuristik, penulis melakukan studi keperpustakaan, baik perpustakaan pribadi maupun perpuustakaan umum. Adapun perpustakaan umum yang penulis kunjungi diantaranya: Perpustakaan Pusat Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang (BPCBS), Perpustakaan Daerah (PUSDA) Kota Serang, Perpustakan Kebersihan, Keindahan dan Ketertibab (K3) dan Perpustakaan Arsip daerah Provinsi Banten. Dari kunjungan-kunjungan ke perpustakaan itu diperoleh data sejarah yang berupa buku sehingga dapat mendukung pelaksanaan studi penelitian.

Penulis telah menemukan sumber yang akan dijadikan sebagai rujukan skripsi ini, diantaranya adalah *Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-bayang Negara; studi kasus Pelajar Islam Indonesia 19801997, Gerakan Pemuda Pelajar Berjuang-KAPPI* (Erwin M Hasan), *Intelegensia Muslim dan Kuas;Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Yudi Latif), *Sejarah Pelajar Islam Indonesia dari kongres ke kongres* (Abdul Halim Tuasikal), *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia* (Ahmad Adaby Darban), *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi Abri* (Ulf Sundhaussen) dan lain-lain.

Dalam tahapan ini selain menggunakan studi pustaka, penulis juga menggunakan studi wawancara dengan informan yang dipilih karena mempunyai hubungan erat dengan pembahasan yang penulis teliti.

3. Ferivikasi atau Kritik

Tahapan keritik atau yang disebut Kuntowijoyo adalah tahapan verifikasi yaitu pengujian untuk memperoleh keabsahan sumber data, baik keasliannya (otensitas) dan kesahihannya (kredibilitas) melalui kritik eksternal maupun keritik internal. Verifikasi dilakukan melalui penelaahan terhadap sifat dan pengarang sumber, baik melalui uji silang (*cross check*) atau melalui kolaborasi, yaitu dengan membandingkan sumber-sumber yang bebas antara satu sama lain.

4. Interpretasi

Tahapann interpretasi atau penafsiran sejarah dilakukan setelah diperoleh fakta-fakta sejarah hasil pengujian dan analisis fakta. Pada tahapan ini dilakukan penafsiran perangkaian fakta-fakta, sehingga didapatkan suatu rangkaian fakta yang saling berkaitan satu sama lain. Karena kompleksnya permasalahan dan penelitian ini maka intrpretasi berdasarkan satu faktor, baik faktor sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan tidak akan cukup menerangkan pola-pola sejarah. Untukk itu digunakan pendekatan multidimensi agar mampu menggunakan faktor-faktor itu dalam interaksinya serta faktor mana yang paling dominan.

5. Historiografi

Tahapan historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Tahapan ini

adalah tahapan lanjut dari tahapan interpretasi dan kemudian hasilnya menjadi tulisan yang dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Historiografi diusahakan selalu memperhatikan aspek kronologis dan penyajian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian dengan analisis pendekatan yang releven.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang trdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Gambaran Umum Pelajar Islam Indonesia (PII), meliputi Proses Lahirnya Pelajar Islam Indonesia (PII), Misi Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Perkembangan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Bab III. Kondisi Politik Pada Masa Transisi Di Indonesia Tahun 1965-1967, meliputi Militer Dalam Dunia Politik di Indonesia, Pembersihan Berdarah Anti Komunis, Runtuhnya Demokrasi Terpimpin.

Bab IV. Kiprah Pelajar Islam Indonesia (PII) Pada Masa Transisi Pemerintahan Indonesia Tahun 1965-1967, meliputi Pelajar Islam Indonesia (PII) Masa Orde Lama, Pelajar Islam Indonesia (PII) Masa Transisi dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Masa Orde Baru.

Bab V. Meliputi Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran.